

Faktor Prioritas dalam Penentuan Lokasi Food Center di Purbalingga

Priority Factors for Food Center Location in Purbalingga

Melita Agustine Mega Puspita^{1*}, Murtanti Jani Rahayu^{1,2}, Rizon Pamardhi Utomo¹

¹Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

²Pusat Informasi dan Pengembangan Wilayah (PIPW), LPPM Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

*Penulis korespondensi. e-mail: melitapuspita@student.uns.ac.id

(Diterima: 25 Maret 2023; Disetujui: 23 Mei 2023)

Abstrak

Keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Purbalingga semakin meningkat tiap tahunnya dan memberikan dampak negatif karena menempati ruang publik secara sporadis, khususnya di Kawasan Alun-alun Kabupaten Purbalingga dan Gelanggang Olah Raga (GOR) Goentoer Darjono. Permasalahan tersebut ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan membangun Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL) tetapi pembangunan tersebut bukan tanpa masalah. Pemilihan Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL menimbulkan perbedaan pandangan dari berbagai pihak. Pemerintah berupaya memilih lokasi Purbalingga Food Center berdasarkan pertimbangan potensi lahan milik pemerintah yang dapat mewadahi PKL dan dekat dengan pusat kota. PKL mengeluhkan lokasi tersebut kurang potensial untuk mendatangkan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor prioritas pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL berdasarkan persepsi stakeholder. Penelitian menggunakan pendekatan deduktif dengan teknik analisis Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk mengetahui faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi pemilihan lokasi Purbalingga Food Center. Hasil analisis mengungkapkan bahwa prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL menurut stakeholder terfokus pada tujuh faktor prioritas, yaitu rencana dan kebijakan pengembangan kota, lahan milik pemerintah, peraturan zonasi kegiatan PKL, kedekatan dengan aktivitas utama, fasilitas listrik, fasilitas air bersih, serta kemudahan lokasi untuk dilihat dengan jelas (visibilitas).

Kata kunci: AHP; faktor pemilihan lokasi; Pedagang Kaki Lima; relokasi

Abstract

The existence of street vendors in Purbalingga Regency increases every year and has a negative impact because it occupies public space in a sporadic matter, particularly at the Alun-alun area of Purbalingga Regency and at Goentoer Darjono Sport Arena (GOR). This issue was followed up by the Government of Purbalingga Regency by constructing Purbalingga Food Center as a place to relocate the street vendors but the development was not without problems. In fact, the decision of the location of Purbalingga Food Center has led to different views from various parties. The government decided the location for Purbalingga Food Center based on considerations to utilize potential government-owned land that is sufficient to accommodate the street vendors and located not far from the city center. However, the street vendors complain that the decided location lacks potential to attract customers. This research aims to understand the priority factors for deciding the location of Purbalingga Food Center based on the perspective of stakeholders. This research uses a deductive approach with analysis using Analytical Hierarchy Process (AHP). Results of the analysis reveals that the priority factors for deciding the location of Purbalingga Food Center is focused on seven factors, namely urban development plans and policies, status of government-owned land, zoning regulations for street vendor activities, proximity to main activities, electricity facilities, clean water facilities, and easy location to see clearly (visibility).

Keywords: AHP; location decision factor; relocation; street vendors

1. PENDAHULUAN

Fenomena urbanisasi memicu meningkatnya pertumbuhan penduduk di kawasan perkotaan. Hal tersebut mampu memberikan dampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada. Jika pertumbuhan penduduk tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah lapangan pekerjaan di perkotaan, maka angka pengangguran di suatu kota akan semakin meningkat. Pengangguran juga disebabkan karena rendahnya kapasitas sumber daya manusia dalam bersaing di dunia kerja, sehingga mendorong seseorang untuk bekerja pada sektor informal sebagai alternatif dalam memenuhi kesejahteraan hidupnya (Mustafa, 2008b).

Sektor informal merupakan sektor yang bersifat sederhana, berskala kecil, tidak terorganisir, tidak membutuhkan keahlian tertentu, biasanya merupakan masyarakat golongan menengah ke bawah (Mulyadi, 2017). Salah satu bentuk mata pencaharian dalam sektor informal adalah Pedagang Kaki Lima atau PKL. PKL dapat diartikan sebagai “*hawkers*” yang berarti seseorang yang menjual barang serta jasa pada ruang-ruang publik kota (McGee & Yeung, 1977). Keberadaan PKL di perkotaan menciptakan pandangan dualisme. Dari segi positif, keberadaan PKL dianggap potensial karena mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah (Suyanto & Karnaji, 2005). Sementara itu dari segi negatif, PKL mengganggu ketertiban dan keindahan kota sehingga dapat menyebabkan ketimpangan penggunaan pemanfaatan ruang publik dengan pengguna lainnya (Mustafa, 2008a).

Dalam rangka upaya pengembalian fungsi ruang publik (revitalisasi) pada Kawasan Alun-alun Kabupaten Purbalingga dan Kawasan Gelanggang Olah Raga (GOR) Goentor Darjono, maka dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Purbalingga mengeluarkan Peraturan Bupati Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Penunjukkan Lokasi sebagai Tempat Berjualan Bagi Pedagang yang beres menunjukkan lokasi Purbalingga Food Center sebagai ruang khusus untuk menampung PKL yang direlokasi dari Kawasan Alun-alun Kabupaten Purbalingga dan Kawasan GOR Goentor Darjono. Penentuan pusat kuliner tersebut tentunya membutuhkan salah satu pertimbangan penting, yakni terkait faktor lokasi. Faktor pemilihan lokasi berperan penting dalam menentukan keberlanjutan usaha. Ketidaktepatan dalam pemilihan dan penempatan lokasi usaha PKL mampu berakibat pada sulit berkembangnya usaha (Fitriyani et al., 2019). Pemilihan lokasi PKL ditentukan oleh berbagai faktor seperti ketersediaan lahan, kebijakan pemerintah, kestrategisan lokasi, keamanan lokasi, serta sarana dan prasarana pendukung. Ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak dalam penataan PKL (Rahayu, 2020). Kestrategisan lokasi dapat dilihat dari aspek kedekatan dengan aktivitas utama, visibilitas, keterjangkauan transportasi umum, fungsi jalan, dan jalur pedestrian. Keamanan lokasi dari tindak kejahatan juga perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi usaha PKL. Ketersediaan sarana prasarana pendukung seperti fasilitas air bersih, fasilitas listrik, fasilitas persampahan, jaringan drainase, fasilitas parkir, dan fasilitas toilet juga berperan dalam menunjang kegiatan operasionalisasi usaha PKL.

Dalam implementasinya, upaya relokasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Purbalingga menimbulkan perbedaan perspektif di berbagai pihak. Pihak pemerintah memilih lokasi tersebut atas dasar pertimbangan keterbatasan lahan yang dimiliki pemerintah dan kemungkinan luasan lahan untuk menampung seluruh PKL yang direlokasi. Dari segi pedagang, PKL mengeluhkan lokasi yang kurang potensial dari segi lokasi sehingga sebagian pedagang memilih berhenti dan/atau keluar dari lokasi Purbalingga Food Center tersebut. PKL yang berdagang di luar lokasi lebih memilih berjualan di lokasi yang lebih mudah terlihat oleh konsumen. Pernyataan ini selaras dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa tujuan penataan PKL belum sepenuhnya berhasil secara menyeluruh dan sebagian PKL akan memilih kembali keluar dari lokasi pengelolaan yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat (Rahayu et al., 2013).

Berdasarkan permasalahan di atas, pemilihan lokasi Purbalingga Food Center di Kabupaten Purbalingga perlu menjadi perhatian dan pertimbangan dari berbagai pihak untuk mendukung keberlanjutan rencana tersebut. Tujuan dilakukannya relokasi adalah untuk revitalisasi ruang publik dan meningkatkan kesejahteraan PKL. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor prioritas yang mempengaruhi pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL.

2. KAJIAN TEORI

2.1 SEKTOR INFORMAL

Sektor informal pertama kali muncul berasal dari gagasan seorang antropolog Inggris, yakni Hart (1973) dari University of Manchester yang dalam studi terkait pengamatannya terhadap aktivitas masyarakat di Kota Accra dan Nima, Afrika. Hart menyatakan bahwa sektor informal merupakan bagian di luar angkatan kerja yang terorganisasi. Menurut Toruan (1991), sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) pola usaha yang tidak terorganisasi; (2) tidak mempunyai izin atau legalitas usaha; (3) pola aktivitas yang tidak teratur; (4) kebijakan pemerintah yang biasanya tidak memwadahi sektor informal; (5) teknologi sederhana; (6) mudah berganti ke subsektor lain; (7) tidak membutuhkan tingkat pendidikan formal; (8) *one man enterprise*; serta (9) hasil produksi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

2.2 PEDAGANG KAKI LIMA DALAM SEKTOR INFORMAL

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu mata pencaharian di sektor informal. Pada mulanya istilah kaki lima berasal dari trotoar yang mempunyai ukuran lebar 5 *feet* atau dapat diartikan sama dengan ukuran $\pm 1,5$ meter sehingga makna PKL merujuk pada seseorang yang berdagang pada kaki lima, dan umumnya memilih lokasi yang ramai. Dalam

perkembangannya, PKL tidak hanya berdagang di trotoar saja, melainkan dapat berjualan pada jalur pejalan kaki, tempat-tempat parkir, ruang-ruang terbuka, taman-taman, terminal, di persimpangan jalan, serta keliling dari rumah ke rumah (Sari, 2003). PKL juga dapat diartikan sebagai pelaku usaha yang melakukan aktivitas perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, serta bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap. PKL mempunyai beberapa karakteristik di antaranya sebagai berikut (Kartono et al., 1980): (1) pelaku usaha dapat bertindak sebagai produsen, (2) pada umumnya berjualan dengan menggunakan berbagai sarana usaha dan berlokasi di tepi jalan yang strategis; (3) menjual barang eceran; (4) modal kecil; (5) pada umumnya berasal dari kelompok marginal/submarginal; (6) kualitas barang yang diperdagangkan relatif rendah; (7) omzet kecil; (8) konsumen berdaya beli rendah; (9) jarang ditemukan kasus PKL yang sukses secara ekonomi; (10) *family enterprise*; (11) bersifat *one-man enterprise*; (12) berdagang tidak terikat dengan waktu; (13) sebagian PKL berdagang dengan barang dagangan yang berubah-ubah; (14) menjual barang yang bersifat umum; (15) transaksi tawar menawar; (16) tidak memiliki legalitas usaha; (17) sebagian besar berasal dari kelompok masyarakat berstatus ekonomi rendah; (18) memiliki perasaan setia kawan yang kuat antar rekan usaha; serta (19) jiwa kewirausahaan yang kuat.

2.3 PEMILIHAN LOKASI PEDAGANG KAKI LIMA

Faktor lokasi merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mendukung kegiatan PKL. Lokasi memiliki peran penting dalam kesuksesan suatu usaha (Suryani, 2015). Ketidaktepatan dalam pemilihan lokasi akan berakibat terhambatnya keberhasilan usaha PKL (Fitriyani et al., 2019). Perencanaan serta pembangunan lokasi relokasi PKL tidak terlepas dari pemilihan lokasi yang telah ditentukan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kawasan kuliner. Pemilihan lokasi relokasi PKL perlu memperhatikan beberapa karakteristik lokasi PKL agar nantinya lokasi tersebut memiliki keberlanjutan. Ketersediaan lahan merupakan syarat mutlak untuk dilaksanakannya pengelolaan PKL (Blackburn, 2011). PKL cenderung memilih lokasi yang strategis. Lokasi strategis dapat diartikan lokasi yang ramai dan berada di pusat kota yang dianggap menguntungkan bagi PKL (Bromley dalam Manning & Effendi, 1996). Kedekatan dengan keramaian terhadap lokasi PKL sekitar ≤ 25 m dan ≤ 100 m (Rahayu, 2020). Menurut Hamdan et al., (2017) terdapat interaksi PKL dengan aktivitas di sekitarnya. Lama berdagang atau jam pelayanan PKL yang menyesuaikan ritme aktivitas utama yang didekati (McGee & Yeung, 1977). Namun, interaksi PKL dengan aktivitas utama di sekitarnya tidak selalu menyesuaikan waktu operasional aktivitas utama di dekatnya. Oleh karena itu, keberadaan PKL di sekitar aktivitas utama berperan sebagai pelengkap kegiatan atau *activity support* (Shirvani, 1985).

Kemudahan aksesibilitas suatu lokasi menunjukkan semakin strategisnya suatu lokasi. Faktor aksesibilitas dapat ditinjau dari kemudahan pencapaian serta kelengkapan sarana dan prasarana transportasi. Kemudahan lokasi untuk dijangkau dengan transportasi umum maupun transportasi pribadi dapat menjadi daya tarik lokasi perdagangan (Nelson, 1958). Selain itu, keterjangkauan lokasi PKL dapat diartikan terjangkaunya lokasi tersebut dengan berjalan kaki dengan waktu maksimal 10 menit (McGee & Yeung, 1977). Sementara itu, menurut Untermann (1984), rata-rata jalan berjarak kaki ideal yaitu 400 m.

Menurut penelitian Rahayu et al. (2015) terkait penyusunan zonasi lokasi pengelolaan PKL di Kota Surakarta, terdapat beberapa pertimbangan dalam penentuan relokasi PKL diantaranya ketersediaan lahan milik pemerintah, tingkat atau kelas jalan, keramaian jalan dan dimensi jalan, ketersediaan fasilitas dasar, peluang PKL beraglomerasi, serta jam dagang. Adapun penelitian Haryanti (2008) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor lokasi kegiatan dagang PKL, yakni keramaian lokasi, kemungkinan berbelanja tinggi, serta kenyamanan dan keamanan. Lokasi dagang PKL dapat dikatakan aman dan nyaman apabila lokasi tersebut bebas dari ancaman yang mengganggu seperti penertiban atau pengusuran dan gangguan dari preman. Pendapat tersebut juga selaras dengan Rahayu (2020) yang juga mengatakan bahwa keamanan lokasi dapat ditinjau apabila lokasi tersebut aman dari tindak kejahatan dan pengusuran. Menurut Demas & Dewanti (2021), terdapat faktor-faktor yang berpengaruh dalam pemilihan lokasi usaha PKL, yakni: (1) sirkulasi; (2) dekat permukiman; (3) aksesibilitas; (4) ekspansi; (5) lahan parkir; (6) jaringan listrik; (7) jaringan air bersih; (7) jaringan limbah; (8) lingkungan; (10) visibilitas; (11) fungsi jalan; (12) akses pejalan kaki; serta (13) kebijakan tata ruang. Sementara itu, Tjiptono (2002) menyatakan bahwa terdapat pertimbangan pemilihan lokasi usaha diantaranya, yaitu: (1) aksesibilitas; (2) visibilitas; (3) lalu lintas; (4) parkir yang nyaman; (5) ekspansi; (6) ketersediaan sarpras; (7) lingkungan; (8) persaingan; serta (9) peraturan pemerintah.

Mengacu dari berbagai pendapat pakar atau ahli di atas maka dihasilkan sintesis variabel penelitian yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sintesis Variabel Penelitian

Kriteria	Faktor	Sumber
Ketersediaan lahan	Status lahan milik pemerintah Ekspansi lahan	Blackburn dalam Rahayu (2020); Rahayu et al. (2015) Tjiptono (2007); Demas & Dewanti (2021)
Kestrategisan lokasi	Kedekatan dengan keramaian/aktivitas utama Kemudahan dilihat dengan jelas (kemudahan visibilitas) Keterjangkauan transportasi umum Jenis fungsi/kelas jalan Jalur pedestrian/pejalan kaki	Maulidiyah (2016); Tjiptono (2007); Hamdan et al. (2017); Rahayu et al. (2015); Demas & Dewanti (2021). McGee & Yeung (1977); Tjiptono (2007); Hamdan et al. (2017); Maulidiyah (2016); Demas & Dewanti (2021); Rahayu (2020). Maulidiyah (2016); Tjiptono (2007); Hamdan et al. (2017); Widjajanti (2016); Demas & Dewanti (2021). Demas & Dewanti (2021); Rahayu et al. (2015). Widjajanti (2016); Demas & Dewanti (2021).
Keamanan lokasi dari tindak kejahatan	-	Rahayu (2020); Haryanti (2008).
Kebijakan Pemerintah	Peraturan terkait lokasi kegiatan PKL Rencana dan kebijakan pengembangan kota	(Tjiptono, 2007); Hamdi (2011); Maulidiyah (2016); Demas & Dewanti (2021).
Sarana dan Utilitas Pendukung	Fasilitas kelistrikan Fasilitas air bersih Fasilitas persampahan Jaringan drainase Fasilitas parkir Fasilitas toilet	Rahayu et al. (2015); Tjiptono (2007); Maulidiyah, (2016); Demas & Dewanti (2021)

3. METODE PENELITIAN

3.1 RUANG LINGKUP PENELITIAN



Gambar 1. Lokus Penelitian

Lokus penelitian adalah Kawasan Purbalingga Food Center, Kabupaten Purbalingga. Kawasan ini ditetapkan sebagai lokasi relokasi PKL oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 94 Tahun 2019

tentang Penataan dan Penunjukkan Lokasi sebagai Tempat Berjualan bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga. Lokus penelitian disajikan pada Gambar 1. Dalam penelitian ini, substansi yang dibahas yaitu terkait faktor-faktor prioritas yang mempengaruhi pemilihan lokasi Purbalingga Food Center. Komponen yang digunakan untuk mengkaji faktor prioritas pemilihan lokasi Purbalingga Food Center tersebut didapatkan berdasarkan hasil sintesis teori dari berbagai ahli/pakar. Penelitian ini terbatas pada pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi Purbalingga Food Center yang mengabaikan potensi lokasi lain yang berpotensi dan tidak merumuskan alternatif lokasi.

3.2 JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan adalah model deduktif dimana penelitian dilakukan dengan alur berpikir yang didasarkan pada pernyataan yang bersifat umum mengerucut ke hal-hal yang khusus dengan menggunakan logika tertentu. Kaitannya dengan pendekatan deduktif pada penelitian ini mengaplikasikan teori-teori terkait karakteristik lokasi PKL dari berbagai pendapat pakar atau ahli yang digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat faktor prioritas pemilihan lokasi relokasi PKL dan menjadi dasar dalam menjawab tujuan penelitian.

3.3 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi di lapangan, kuesioner, serta wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari survei instansi dan studi literatur berupa data instansi, kajian dokumen pemerintah, dan sumber lainnya yang berasal dari internet. Data yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan tahun data ketika penelitian dilakukan, yakni tahun 2022. Narasumber ahli dipilih melalui analisis *stakeholder mapping*. Kuesioner diberikan kepada narasumber ahli yang memahami terkait PKL. Oleh karena itu, peneliti membutuhkan *stakeholder* ahli yang mempunyai keahlian, pengalaman, serta pengetahuan yang memadai terkait dengan topik penelitian yang dikaji, yakni terkait faktor prioritas pemilihan lokasi.

Pada penelitian ini, dilakukan identifikasi pengaruh dan kepentingan dari masing-masing *stakeholder*. Untuk ini, dilakukan studi dokumen berdasarkan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing instansi dan sesuai dengan bidang penelitian yang dikaji. Penentuan jumlah narasumber tidak memperhitungkan minimal jumlah narasumber pada umumnya karena narasumber yang terpilih merupakan *expert* (orang yang paham dan ahli) sesuai dengan bidang yang dikaji dalam penelitian sehingga pada penelitian ini lebih mengutamakan kualitas jawaban narasumber dibandingkan dengan kuantitas narasumbernya. Dalam penentuan narasumber penelitian ini juga dipertimbangkan keterbatasan sumber daya manusia yang ada. Menurut Reed et al., (2009) identifikasi tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan *stakeholder* dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok, yakni :

- a) *Subject*: mempunyai kapasitas rendah untuk mewujudkan tujuan tetapi memiliki pengaruh terhadap *stakeholder* lainnya;
- b) *Key players*: mempunyai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh tinggi;
- c) *Crowd*: mempunyai tingkat kepentingan dan tingkat pengaruh yang rendah; dan
- d) *Context setter*: mempunyai tingkat kepentingan rendah tetapi memiliki tingkat pengaruh tinggi.

Berdasarkan identifikasi tingkat pengaruh dan tingkat kepentingan *stakeholder* diatas, selanjutnya dilakukan *stakeholder mapping* sebagaimana diuraikan pada Tabel 3 berikut. Stakeholder yang ada dipetakan menurut tingkat pengaruh dan tingkat kepentingannya. Semakin tinggi tingkatnya, maka semakin tinggi skor stakeholder tersebut.

Tabel 2 . Identifikasi Tingkat Pengaruh dan Tingkat Kepentingan Stakeholder

Tingkat Kepentingan	Tingkat Pengaruh				
	1	2	3	4	5
1					
2					
3			CSR	Akademisi (Bidang tata ruang, ekonomi, sosial dan politik)	
4			DPUPR; Dishub; Satpol PP; DLH		Bappelitbangda;
5			Paguyuban PKL		Dinas Perdagangan dan Perindustrian;

Keterangan:

 : *Keyplayers*
 : *Subject*

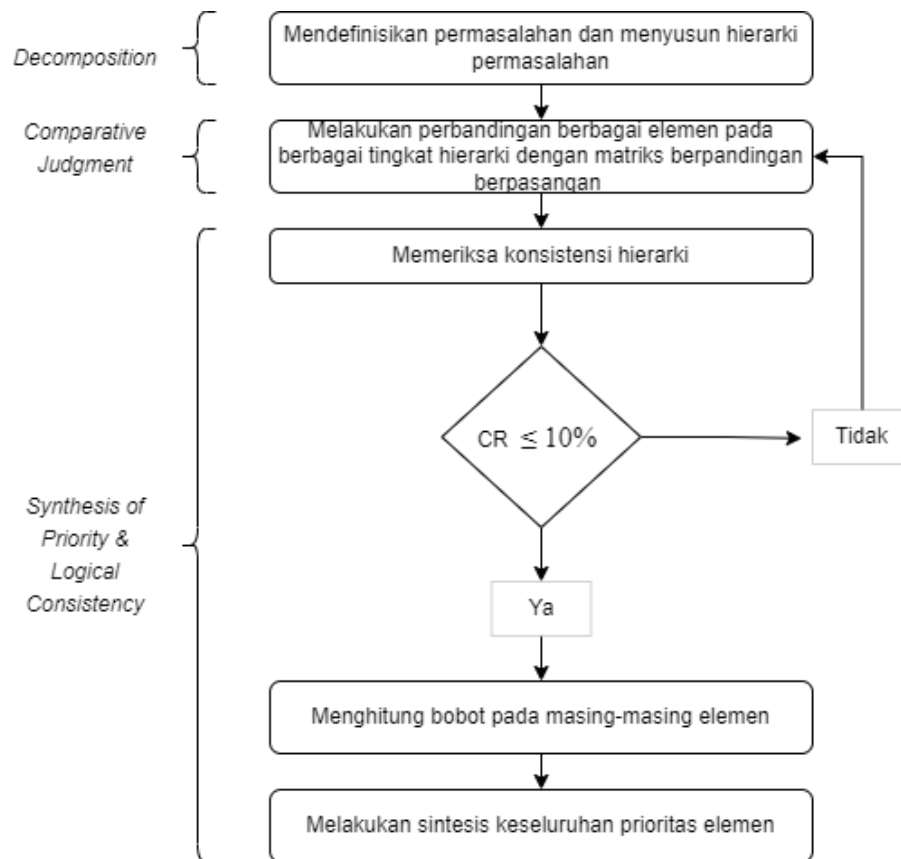
 : *Context Setter*
 : *Crowd*

Stakeholder dipilih terdiri dari tiga golongan yaitu pemerintah, akademisi, serta bisnis. Stakeholder terdiri atas 13 orang dengan rincian sebagai berikut :

- a) Pemerintah/government : Bappelitbangda (1 orang), Disperindag (1 orang), DPUPR (1 orang), DLH (1 orang), Dishub (1 orang), Satpol PP (1 orang);
- b) Akademisi: Dosen Ekonomi Unsoed (1 orang), Dosen Fisip Unsoed (1 orang), Dosen PWK UNS (1 orang);
- c) Bisnis/business: Corporate Social Responsibility/CSR (PT. BPR BKK Kabupaten Purbalingga, 2 orang), Pengurus Paguyuban PKL (3 orang).

3.4 TEKNIK ANALISIS DATA

Penelitian ini menggunakan teknik analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*). Teknik analisis AHP digunakan untuk mengetahui faktor-faktor prioritas pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL dengan menggunakan bantuan aplikasi *Expert Choice 11*. AHP merupakan model pengambilan keputusan didasarkan pada penggabungan penilaian individu terhadap suatu permasalahan untuk menyederhanakan permasalahan yang bersifat multi kriteria menjadi sebuah susunan permasalahan yang hierarkis (Saaty, 2008). AHP juga memungkinkan untuk pengambilan keputusan yang dikembangkan untuk pemberian prioritas dengan mempertimbangkan beberapa kriteria dan menyusun masalah yang kompleks ke dalam suatu hierarki atau level yang terintegrasi (Botelho, 2022). Selain itu, AHP merupakan sebuah metode untuk memberikan ranking atau urutan ketika beberapa kriteria dan sub kriteria dibandingkan sehingga didapatkan faktor prioritas (Singer & Ozsahin, 2018). Adapun tahapan-tahapan AHP adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Tahapan dalam Analisis AHP

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 IDENTIFIKASI KAWASAN PURBALINGGA FOOD CENTER

Purbalingga Food Center merupakan salah satu pusat kuliner di Kabupaten Purbalingga. Kawasan Purbalingga Food Center berlokasi di Jalan Lingkar Selatan GOR Goentoe Darjono, Kelurahan Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Pada tahun 2019, Kawasan Purbalingga Food Center ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten

Purbalingga sebagai ikon sekaligus wadah khusus untuk menampung PKL yang direlokasi dari Kawasan Alun-alun Kabupaten Purbalingga dan Kawasan GOR Goentoer Darjono. Kawasan Purbalingga Food Center memiliki luas sebesar 1536 m² yang terbagi ke dalam PFC Timur seluas 1.440 m² dan PFC Barat sebesar 96 m². PKL yang berdagang di Kawasan PFC berjumlah 316 pedagang. Kawasan Purbalingga Food Center dibangun secara bertahap mulai dari tahun 2019 hingga 2022 dengan menggunakan anggaran APBD ± 12 milyar rupiah.



Gambar 3. Purbalingga Food Center

4.2 ANALISIS PERKEMBANGAN KAWASAN PERGURUAN TINGGI

Analisis AHP dilakukan pada tingkat hierarki kedua dan ketiga. Analisis pada hirarki kedua bertujuan untuk menghitung bobot nilai setiap kriteria yang akan digunakan sebagai input dalam menentukan peringkat faktor prioritas pada hierarki ketiga. Analisis pada hierarki ketiga diperoleh dengan mengalikan bobot nilai kriteria dengan bobot nilai subkriteria sehingga didapatkan bobot final untuk setiap faktornya.

Tabel 4. Identifikasi Tingkat Pengaruh dan Tingkat Kepentingan Stakeholder

No	Nama Faktor	Nilai Faktor	Persentase Nilai Bobot (%)
1	Rencana dan kebijakan pengembangan kota	0.155	15,5%
2	Status lahan milik pemerintah	0.136	13,6%
3	Kebijakan terkait lokasi kegiatan PKL	0.130	13%
4	Kedekatan dengan keramaian/aktivitas utama	0.097	9,7 %
5	Fasilitas kelistrikan	0.094	9,4 %
6	Fasilitas air bersih	0.091	9,1%
7	Kemudahan lokasi untuk dilihat (visibilitas) dengan jelas	0.070	7%
8	Fasilitas persampahan	0.043	4,3%
9	Fasilitas parkir	0.030	3%
10	Jaringan drainase	0.027	2,7%
11	Jalur pedestrian	0.026	2,6%
12	Keamanan lokasi dari tindak kejahatan	0.024	2,4%
13	Keterjangkauan transportasi umum	0.021	2,1%
14	Fasilitas toilet	0.020	2%
15	Jenis/fungsi kelas jalan	0.019	1,9%
16	Ekspansi lahan	0.017	1,7%

Subuah faktor dikategorikan sebagai faktor prioritas apabila bobot nilai minimum faktor $\geq 0,0625$. Penentuan bobot minimum faktor prioritas didasarkan pada perhitungan rata-rata nilai faktor yang dihasilkan dari pembagian total nilai faktor keseluruhan dibagi dengan banyaknya faktor (Mahayati, 2022). Berdasarkan hasil AHP dari 16 subfaktor didapatkan 7 faktor yang menjadi prioritas dalam pemilihan lokasi Purbalingga Food Center, yaitu rencana dan kebijakan pengembangan kota dengan bobot 15,5%; status lahan milik pemerintah dengan bobot 13,6%; kebijakan terkait lokasi kegiatan PKL dengan bobot 13%; kedekatan dengan keramaian/aktivitas utama dengan bobot 9,7%; fasilitas kelistrikan dengan bobot 9,4%; fasilitas air bersih dengan bobot 9,1%; dan kemudahan visibilitas lokasi dengan bobot 7%.

4.2.1 PRIORITAS 1: RENCANA DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOTA

Rencana dan kebijakan pengembangan kota menjadi prioritas pertama sebagai faktor utama yang berpengaruh besar dalam pemilihan lokasi Purbalingga Food Center. Hal tersebut dikarenakan rencana dan kebijakan kota digunakan sebagai dasar acuan dalam pembangunan pusat perdagangan dan jasa khususnya PKL. Selain itu, rencana dan kebijakan

pengembangan kota memiliki pengaruh besar dalam pemilihan lokasi relokasi PKL sebab dengan adanya kebijakan pengembangan kota maka menyangkut serangkaian rencana untuk mawadahi sektor informal dalam hal ini PKL baik secara makro maupun mikro. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Purbalingga sudah mempunyai fokus arahan untuk pengembangan sentra kuliner tersebut. Dalam hal ini, ketersediaan rencana dan kebijakan pengembangan kota perlu menjadi perhatian untuk pemerintah kabupaten agar permasalahan terkait PKL dapat direduksi dengan mudah Hamdi (2011). Bentuk diwadahnya sektor informal oleh pemerintah dapat dilihat dari mulai tingkat pusat dengan diamanatkannya UU Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang menjelaskan bahwa rencana penyediaan dan pemanfaatan kegiatan sektor informal diperlukan untuk menjalani fungsi wilayah kota sebagai pusat pelayanan sosial ekonomi dan pusat pertumbuhan wilayah. Pada tingkat provinsi dan kabupaten, dapat dilihat bahwa pada dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Kabupaten Purbalingga, Kawasan Perkotaan Purbalingga diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk wilayah Kabupaten Purbalingga dan wilayah di sekitarnya. Salah satu arahan pengembangan Kawasan Perkotaan Purbalingga sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yakni diarahkan sebagai pusat perdagangan dan jasa regional Purbalingga. Selain itu, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang RTRW Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031, Kawasan Perkotaan Purbalingga juga termasuk ke dalam salah satu Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut pandang pertumbuhan ekonomi Purbalingga. Adapun salah satu strategi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi tersebut yaitu dengan penataan kawasan perkotaan dalam rangka meningkatkan efektivitas kegiatan perdagangan dan jasa serta meningkatkan daya tarik wilayah. Ketentuan-ketentuan tersebut dijabarkan secara rinci dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2041, dimana Kawasan Purbalingga Food Center termasuk ke dalam Zona Perdagangan dan Jasa Skala SubBWP.

Dari uraian kebijakan di atas, dapat diketahui bahwa pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sudah mengacu pada kebijakan dan rencana pengembangan daerah setempat baik secara makro maupun mikro. Ketersediaan rencana dan kebijakan pengembangan kota juga menunjukkan secara langsung bahwa pemerintah telah mawadahi kegiatan sektor informal. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Mustafa (2008a) yang menyebutkan bahwa salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam pengembangan kegiatan sektor informal yaitu dengan menyediakan ruang atau wadah untuk PKL. Dengan adanya rencana dan kebijakan yang selaras dengan Peraturan Daerah, maka diharapkan permasalahan terkait PKL dapat direduksi (Hamdi, 2011). Ketersediaan kebijakan juga merupakan bukti bahwa pemerintah melakukan pengelolaan PKL dengan menjamin adanya dukungan kepada PKL, membina PKL agar lebih tertib, serta meningkatkan kesejahteraan PKL (Rahayu & Widyastuti, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan PKL menjadi salah satu sumber potensi perekonomian daerah yang perlu diperhatikan, bukan dianggap sebagai parasit kota.

4.2.2 PRIORITAS 2: STATUS LAHAN MILIK PEMERINTAH

Ketersediaan lahan milik pemerintah merupakan syarat mutlak pengelolaan PKL (Blackburn, 2011). Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 33 ayat 3, penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah. Selain itu, kebijakan lain yang mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum adalah Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum. Berdasarkan UU dan PP tersebut, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang dimaksud salah satunya berupa pasar umum.

Berdasarkan hasil analisis AHP, faktor status lahan milik pemerintah menduduki prioritas kedua dikarenakan keberadaan lahan sangat penting dalam upaya penataan PKL. Jika upaya penataan PKL tidak dibarengi dengan adanya ketersediaan lahan, maka upaya tersebut akan sulit untuk dilaksanakan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor status lahan milik pemerintah dalam pemilihan lokasi Purbalingga Food Center cukup penting sebab berpengaruh terhadap kondisi lahan milik pemerintah yang masih tersedia di Kabupaten Purbalingga. Kawasan Purbalingga Food Center pada mulanya berupa lapangan dan tanah kosong milik pemerintah di Kelurahan Purbalingga Kidul. Pemerintah Kabupaten Purbalingga memilih lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan kepemilikan lahan yang terbatas dan luasan kawasan tersebut dianggap cukup untuk mawadahi seluruh PKL yang direlokasi. Selain itu, lahan yang dipilih tersebut dianggap tidak terlalu jauh dari pusat kota. Jika lahan untuk kepentingan relokasi PKL yang digunakan nantinya milik pribadi maka diperlukan anggaran yang besar untuk membeli lahan tersebut. Hal tersebut didukung oleh pernyataan Blackburn (2011) yang menjelaskan bahwa ketersediaan lahan yang terbatas menjadi salah satu kendala pemerintah dalam membangun ruang untuk pengelolaan PKL. Lahan yang ditunjuk sebagai lokasi relokasi PKL merupakan lahan yang legal karena telah

mendapatkan surat izin penempatan. Walaupun menempati lahan secara legal dan telah mendapatkan ijin penempatan, aktivitas tersebut masih termasuk ke dalam aktivitas informal (Rahayu, 2020).

4.2.3 PRIORITAS 3: KEBIJAKAN TERKAIT LOKASI KEGIATAN PEDAGANG KAKI LIMA

Peraturan zonasi kegiatan PKL merupakan faktor ketiga yang diprioritaskan dalam pemilihan lokasi relokasi PKL. Kebijakan pemerintah khususnya terkait zonasi kegiatan PKL perlu menjadi pertimbangan agar dalam pemilihan lokasi usaha tidak menyalahi aturan pemanfaatan ruang yang berlaku (Demas & Dewanti, 2021; Tjiptono, 2002). Kawasan Purbalingga Food Center telah ditetapkan sebagai kawasan khusus untuk PKL dengan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Penataan dan Penunjukkan Lokasi sebagai Tempat Berjualan bagi Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Purbalingga. Hal tersebut menandakan bahwa pemilihan lokasi sudah mengacu pada peraturan zonasi kegiatan PKL. Dengan adanya peraturan zonasi kegiatan PKL, PKL yang berdagang di lokasi Purbalingga Food Center secara tidak langsung mendapatkan subsidi ruang. Subsidi ruang tersebut berupa Surat Izin Berdagang (SIB) yang dimiliki tiap pedagang. Apabila pedagang tidak aktif berdagang dan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka SIB dapat sewaktu-waktu dicabut sehingga PKL dapat kehilangan lapaknya. Hal ini secara tidak langsung mendorong peningkatan rasa aman PKL dari penggusuran (Rahayu, 2020).

4.2.4 PRIORITAS 4: KEDEKATAN DENGAN KERAMAIAN ATAU AKTIVITAS UTAMA

Kedekatan dengan keramaian/aktivitas utama merupakan faktor keempat yang menjadi prioritas pemilihan lokasi relokasi PKL dikarenakan kedekatan dengan keramaian/aktivitas utama mampu mendukung peluang kunjungan konsumen. PKL mempunyai kecenderungan untuk berdagang di lokasi yang strategis dan ramai yang mampu menumbuhkan peluang kunjungan konsumen lebih tinggi serta bersinergi dengan aktivitas formal yang ditempel yang dapat membentuk sistem aktivitas ruang kawasan (Permadi, 2007). Beragamnya aktivitas di sekitar lokasi usaha merupakan lokasi yang potensial bagi PKL (Rahayu, 2020). Kedekatan aktivitas utama di sekitar lokasi PKL meningkatkan frekuensi lalu lalang konsumen (Widjajanti, 2015a). Kedekatan jarak lokasi PKL dengan aktivitas utama di sekitarnya didominasi oleh jarak ≤ 25 meter dan ≤ 100 meter (Rahayu, 2020). Berdasarkan observasi lapangan, Kawasan Purbalingga Food Center telah dikelilingi oleh berbagai fungsi kegiatan di sekitarnya yang mencakup fungsi pendidikan dengan jarak 15 meter, fungsi ruang terbuka publik dengan jarak 10 meter, fungsi perdagangan dan jasa dengan jarak 100 meter, serta fungsi permukiman dengan jarak 100 meter. Kedekatan PKL dengan aktivitas yang didekatinya membentuk interaksi (Hamdan et al., 2017). Namun, interaksi PKL tidak selalu menyesuaikan waktu operasional di sekitarnya, melainkan dapat bergantian beroperasi sehingga peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh PKL (Rahayu, 2020). Misalnya, pada aktivitas pendidikan di sekitar lokasi yang berlangsung hingga pukul 16.00 WIB sebagian PKL tutup pada waktu itu juga, melainkan setelah kegiatan utama selesai, masih terdapat sebagian besar PKL yang melanjutkan aktivitasnya. Hal tersebut dikarenakan masih ada aktivitas lain di sekitar lokasi seperti rekreasi dan olahraga. Kedekatan lokasi dengan aktivitas di sekitarnya juga menunjukkan bahwa keberadaan PKL untuk menyediakan barang dan jasa yang masyarakat butuhkan setiap hari (Sastrawan, Haris, & Suwena, 2015; Widjajanti, 2016). Selain itu, di sekitar Kawasan Purbalingga Food Center juga terdapat pabrik yang berjarak ± 800 m sehingga dalam hal ini Kawasan Purbalingga Food Center berperan secara langsung dalam melayani masyarakat umum di sekitarnya dan melayani secara tidak langsung pekerja formal tingkat bawah dalam hal ini pekerja pabrik.

4.2.5 PRIORITAS 5: FASILITAS KELISTRIKAN

Kelengkapan fasilitas perdagangan menjadi salah satu faktor penentu pemilihan lokasi untuk melakukan aktivitas khususnya perdagangan dan jasa (Diana dalam Tarigan, 2006). Kelengkapan fasilitas listrik berperan penting dalam menunjang operasionalisasi lokasi PKL (Demas & Dewanti, 2021; Chapin 1979 dalam Irawan, 2002; Tjiptono, 2002). Kawasan Purbalingga Food Center terletak pada tepi jalan lokal utama sehingga lokasi tersebut mudah teraliri listrik. Kawasan Purbalingga Food Center telah didukung dengan kapasitas listrik total sebesar 12.800 watt yang dipasok oleh PLN Kabupaten Purbalingga. Ketersediaan dan kebutuhan listrik di lokasi PKL bergantung pada dominasi jenis dagangan dan waktu pelayanannya (Dwijayanti 2008 dalam Novelia & Sardjito, 2015). PKL yang menempati Kawasan Purbalingga Food Center cenderung dominan berdagang pada waktu sore hingga malam hari sehingga ketersediaan listrik di lokasi berperan penting dalam membantu PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya dan mampu berfungsi sebagai penerangan sehingga meminimalkan kejahatan di malam hari. Faktor fasilitas kelistrikan cukup memiliki pengaruh dalam pemilihan lokasi Purbalingga Food Center dalam menunjang kebutuhan dan kenyamanan baik untuk pedagang maupun konsumen.

4.2.6 PRIORITAS 6: FASILITAS AIR BERSIH

Kelengkapan fasilitas perdagangan menjadi salah satu faktor penentu pemilihan lokasi untuk melakukan aktivitas khususnya perdagangan dan jasa (Diana dalam Tarigan, 2006). Kelengkapan fasilitas air bersih berperan penting dalam menunjang operasionalisasi lokasi PKL (Demas & Dewanti, 2021; Chapin 1979 dalam Irawan, 2002; Tjiptono, 2002). Kawasan Purbalingga Food Center telah ditunjang fasilitas air bersih yang bersumberkan dari PDAM Tirta Dharma Air. Dalam hal ini ketersediaan air bersih perlu menjadi pertimbangan karena air bersih lebih dominan dibutuhkan untuk PKL dengan jenis dagangan makanan siap saji (Andrian & Rukmi, 2023), mengingat dominasi PKL di Kawasan Purbalingga Food Center adalah makanan siap saji. Rata-rata kebutuhan air bersih untuk PKL makanan siap saji makan di tempat yaitu sebanyak 42 – 56 liter/hari dan makanan saji dibawa pulang sebanyak 14 – 21 liter/hari. Kondisi air bersih di Kawasan Purbalingga Food Center tergolong layak digunakan dan dikonsumsi sehingga hal tersebut selaras dengan pernyataan Rahayu (2020) yang menjelaskan bahwa apabila lokasi PKL dalam kondisi bersih, maka akan dapat menarik minat pembeli untuk datang berkunjung, apalagi jenis dagangan PKL sebagian besar adalah makanan siap saji.

4.2.7 PRIORITAS 7: KEMUDAHAN VISIBILITAS

Faktor visibilitas merupakan faktor yang perlu menjadi perhatian dalam pemilihan sebuah lokasi usaha (Demas & Dewanti, 2021; Hamdan et al., 2017; Tjiptono, 2002). Lokasi usaha tidak hanya harus dapat dilihat dengan jelas melainkan juga harus dekat dengan konsumen (Rahayu, 2020). Pernyataan tersebut juga didukung Widjajanti (2016) yang menyatakan bahwa meskipun lokasi dekat, apabila terhalang maka akan mengurangi peluang konsumen untuk mengunjungi lokasi tersebut. Berdasarkan hasil observasi, Kawasan Purbalingga Food Center terletak di pinggir Jalan Lingkar dimana hal tersebut menunjukkan bahwa konsumen dengan mudah dapat menemukan lokasi tersebut karena dapat terlihat dari berbagai arah. Namun, masih terdapat PKL yang cenderung lebih memilih berjualan pada jalur-jalur pedestrian sehingga mengganggu kenyamanan pejalan kaki. Hal tersebut dikarenakan jalur pedestrian merupakan lokasi yang lebih mudah dijangkau langsung oleh konsumen sehingga PKL beranggapan bahwa dengan berlokasi lebih dekat dengan konsumen maka keuntungan yang didapat akan lebih banyak. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2011) terkait PKL di Kota Bogor yang menyatakan bahwa PKL setelah ditertibkan dan disediakan tempat (Blok E Pasar Anyar) akan kembali berjualan di bahu jalan (emperan) karena lokasi tersebut lebih luas dan mendapatkan pembeli yang lebih banyak jika dibandingkan berjualan di dalam kios pasar. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa kondisi visibilitas secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan pedagang karena mendapat peluang kunjungan konsumen. Walaupun dalam hal ini pemerintah sudah menghimbau para PKL dengan memasang reklame berupa peringatan agar tidak berdagang di sepanjang trotoar dan bahu jalan, para PKL masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Sejalan dengan pendapat McGee & Yeung (1977) yang menyatakan bahwa PKL lebih cenderung terkonsentrasi di pinggir jalan dan pintu masuk pasar yang mana lokasi tersebut memiliki intensitas aliran pejalan kaki yang tinggi, para PKL lebih cenderung mendekati atau berdampingan langsung dengan aktivitas perdagangan sehingga membentuk ruang linier di sepanjang ruang publik (jalur sirkulasi) dimana aktivitas itu berada (Widjajanti, 2015b).

4.3 FAKTOR TIDAK PRIORITAS DALAM PEMILIHAN LOKASI PURBALINGGA FOOD CENTER

Dalam pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai relokasi PKL, terdapat 9 faktor yang tidak menjadi prioritas dalam pemilihan lokasi Purbalingga Food Center, yaitu fasilitas persampahan, fasilitas parkir, jaringan drainase, jalur pedestrian, keamanan lokasi dari tindak kejahatan, keterjangkauan transportasi umum, fasilitas toilet, fungsi kelas jalan, dan ekspansi lahan. Faktor ke-8, yaitu fasilitas persampahan berperan penting dalam menunjang lokasi kebersihan lokasi PKL. Hal tersebut didukung dengan mayoritas PKL yang berdagang di Kawasan Purbalingga Food Center merupakan PKL makanan siap saji sehingga aspek kebersihan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi PFC. Namun dalam hal ini, para PKL dapat dengan mudah menyediakan kantong atau tempat sampah secara mandiri untuk menunjang kegiatan berdagangnya sehingga mampu mendukung kenyamanan bagi penggunanya. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Surya (2006) bahwa PKL yang membutuhkan prasarana penunjang dapat mengusahakannya sendiri.

Selanjutnya, faktor fasilitas parkir menduduki urutan ke-9 dikarenakan banyaknya pedagang maupun konsumen yang dapat menjangkau Kawasan Purbalingga Food Center dengan kendaraan pribadi. Keberadaan lahan parkir akan membuat lokasi PKL menjadi lebih teratur dan tidak lagi memicu kemacetan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Novelia & Sardjito (2015) bahwa keberadaan lahan parkir dibutuhkan dalam menata lokasi PKL agar tidak menimbulkan permasalahan baru. Selanjutnya, faktor jaringan drainase menduduki urutan ke-10 dikarenakan keberadaan jaringan

drainase berfungsi sebagai penyalur massa air yang berlebih untuk mencegah terjadinya genangan saat musim penghujan. Faktor jalur pedestrian menempati urutan ke-11 dikarenakan dalam kondisi eksisting jalur pedestrian di Kawasan Purbalingga Food Center digunakan oleh PKL untuk berdagang sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat menyebabkan ketimpangan penggunaan ruang antara konsumen dengan PKL. Faktor keamanan lokasi dari tindak kejahatan menduduki urutan ke-12 dikarenakan berdasarkan hasil wawancara Kawasan Purbalingga Food Center tergolong aman. Kondisi demikian didukung dengan adanya aktivitas utama di sekitarnya yang mampu mendukung keamanan dari lokasi Purbalingga Food Center. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Rahayu (2020) yang menyatakan bahwa kedekatan lokasi PKL dengan aktivitas utama di sekitarnya secara tidak langsung akan mendukung terciptanya keamanan karena selalu ada orang yang akan beraktivitas di sekitarnya. Faktor keterjangkauan transportasi umum menduduki urutan ke-13 dikarenakan Kawasan Purbalingga Food Center tidak dilewati langsung oleh transportasi umum seperti angkutan kota dan Trans Jateng. Selanjutnya faktor fasilitas toilet menduduki urutan ke-14, yaitu fasilitas toilet dikarenakan dalam hal ini fasilitas toilet berperan sebagai fasilitas penunjang sehingga baik konsumen maupun pedagang dapat memanfaatkan ketersediaan toilet umum pada fasilitas umum yang ada di sekitarnya seperti GOR Goentoe Darjono. Hal tersebut selaras dengan pendapat Surya (2006) yang menyatakan bahwa baik PKL ataupun konsumen dapat memanfaatkan fasilitas pendukung yang ada pada aktivitas utama di sekitarnya. Faktor fungsi kelas/jalan menduduki urutan ke-15 dikarenakan Kawasan Purbalingga Food Center terletak pada Jalan Lingkar yang melayani kelas jalan lokal primer. Hal tersebut menandakan bahwa pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sudah mempertimbangkan kelas atau fungsi jalan yang memudahkan untuk dilakukannya transaksi dan dilalui banyak orang maupun kendaraan (Demas & Dewanti, 2021). Selanjutnya faktor terakhir, yaitu ekspansi lahan dikarenakan keterbatasan lahan yang dimiliki oleh pemerintah sehingga dalam hal ini dalam pemilihan lokasi Purbalingga Food Center tidak terlalu mempertimbangkan ekspansi lahan walaupun lahan yang terbangun tersedia memiliki luas 250 m².

5. KESIMPULAN

Pembangunan Purbalingga Food Center pada hakikatnya dibangun untuk menampung Purbalingga Food Center yang direlokasi dari Kawasan Alun-alun Kabupaten Purbalingga dan Kawasan GOR Goentoe Darjono. Relokasi dilakukan dalam rangka revitalisasi ruang publik dan meningkatkan kesejahteraan PKL. Faktor lokasi berperan penting dalam mendukung keberlanjutan Purbalingga Food Center. Isu utama pembangunan Purbalingga Food Center adalah terdapat perbedaan sudut pandang antara pemerintah dengan PKL terkait lokasi relokasi sehingga upaya relokasi belum dapat secara maksimal. Dari keseluruhan 16 faktor, terdapat 7 faktor yang diprioritaskan dalam pemilihan lokasi Purbalingga Food Center yaitu: (1) rencana dan kebijakan pengembangan kota; (2) lahan milik pemerintah; (3) peraturan zonasi kegiatan PKL; (4) kedekatan dengan keramaian atau aktivitas utama di sekitarnya; (5) fasilitas listrik; (6) fasilitas air bersih; serta (7) kemudahan lokasi untuk dilihat dengan jelas (visibilitas).

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh peneliti. Pemerintah daerah selaku pembuat kebijakan memiliki peran penting dalam memikirkan langkah ke depan dengan tepat karena pertumbuhan jumlah PKL terus meningkat. Pemerintah daerah diharapkan dapat mengawasi dan tegas PKL yang berjualan di luar zonasi yang telah ditetapkan sehingga hal tersebut mampu mencegah PKL lain di Purbalingga Food Center mengikuti perilaku tersebut. Pemerintah juga perlu melakukan pengembangan dan peningkatan produktivitas Purbalingga Food Center sebagai tempat pertumbuhan ekonomi baru sekaligus sebagai ruang publik baru yang nantinya dapat menjadi ikon di Kabupaten Purbalingga. Selain itu, penelitian ini terbatas dalam melihat faktor prioritas pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai lokasi Purbalingga Food Center ditinjau dari karakteristik lokasi PKL untuk penelitian yang berikutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian faktor lokasi PKL untuk wilayah pengelolaan PKL lainnya. Penelitian ini juga terbatas pada kajian faktor prioritas pemilihan lokasi Purbalingga Food Center sebagai lokasi relokasi PKL ditinjau dari pendapat pakar atau ahli untuk penelitian selanjutnya dapat dikembangkan dengan mentriangulasikan dari sumber yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian, R. B., & Rukmi, W. I. (2023). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan Segitiga Jatinegara Jalan Matraman Raya–Jalan Bekasi Barat. *Planning for Urban Region and Environment*, 12(2), 247–256. Diakses dari: <https://purejournal.ub.ac.id/index.php/pure/article/view/536/424>
- Botelho, M. N. (2022). Analyzing the AHP Priority Vectors : Going Beyond Inconsistency Indexes. *International Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 14(2), 1–19. <https://doi.org/10.13033/IJAHP.V14I2.922>
- Demas, K. L. A. M., & Dewanti, A. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Dalam Pemilihan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Pagi, Kota Samarinda. *Jurnal RUANG*, 7(2), 96–104. Diakses dari: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ruang/article/view/11852>
- Fitriyani, S., Murni, T., & Warsono, S. (2019). Pemilihan Lokasi Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Keberhasilan Usaha Jasa Berskala

- Mikro dan Kecil. *Management Insight*, 13(1), 47–58. <https://doi.org/10.33369/insight.13.1.47-58>
- Hamdan, A., Witjaksono, A., & Setiyawan, A. (2017). Penentuan Lokasi Relokasi Pedagang Kaki Lima Dengan Komparasi Lokasi Di Kawasan Alun-Alun Kota Batu. *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*. Kota Malang: Institut Teknologi Nasional Malang. Diakses dari: <https://docplayer.info/137438879-Penentuan-lokasi-relokasi-pedagang-kaki-lima-menurut-preferensi-pedagang-dengan-komparasi-lokasi-di-kawasan-alun-alun-kota-batu.html>
- Hamdi. (2011). Konsep Perencanaan dan Pengembangan Ruang Bagi Pedagang Kaki Lima Jalan Sabang, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. *Jurnal Planesa*, 2(2), 163–173. Diakses dari: <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/planesa/article/download/552/514>
- Hart, K. (1973). Informal Income Urban Ghana Opportunities and. *Journal of Modern African Studies*, 11(1), 61–89. Diakses dari: <https://www.jstor.org/stable/159873>
- Haryanti, D. T. (2008). *Kajian Pola Pemanfaatan Ruang Terbuka Publik Kawasan Bundaran Simpang Lima Semarang* (Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro. Diakses dari: <http://eprints.undip.ac.id/17085/>
- Irawan, H. (2002). *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*. Jakarta: Elex Media Komputindo. Diakses dari: <https://onesearch.id/Record/IOS2757.slims-14712/TOC>
- Latifah, A. (2016). *Karakteristik Pedagang Kaki Lima Makanan Siap Saji di Tempat di Kawasan Pendidikan Tinggi Jebres Berdasarkan Faktor Lokasi* (Universitas Sebelas Maret). Universitas Sebelas Maret. Diakses dari: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/52919/Mj1MzAw/Karakteristik-Pedagang-Kaki-Lima-Makanan-Siap-Saji-di-Tempat-di-Kawasan-Pendidikan-Tinggi-Jebres-Berdasarkan-Faktor-Lokasi-abstrak.pdf>
- Mahayati, P. (2022). *Faktor Prioritas Kesiapan Penanganan Permukiman Kumuh (Studi Kasus Kawasan Bantaran Kali Anyar)* (Universitas Sebelas Maret). Universitas Sebelas Maret. Diakses dari: <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/94388/NTUyNDY5/Faktor-Prioritas-Kesiapan-Penanganan-Permukiman-Kumuh-Studi-Kasus-Kawasan-Bantaran-Kali-Anyar-abstrak.pdf>
- Manning, C., & Effendi, T. N. (1996). *Urbanisasi, Pengangguran, dan Sektor Informal di Kota*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Diakses dari: <https://onesearch.id/Record/IOS3187.INLIS00000000015670>
- McGee, T. G., & Yeung, Y. M. (1977). *Hawkers in Southeast Asian Cities: Planning for the Bazaar Economy*. Ottawa: Ottawa International Development Research Center. Diakses dari: <https://onesearch.id/Record/IOS3765.SULSE000000000069431>
- Mulyadi. (2017). *Ekonomi Sumber Daya Manusia: dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajawali Press. Diakses dari: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1137470>
- Mustafa, A. A. (2008a). *Model Transformasi Sosial Sektor Informal*. Kota Malang: In-Trans Publishing. Diakses dari: <https://onesearch.id/Record/IOS12528.ai:slims-22010>
- Mustafa, A. A. (2008b). *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal*. Kota Malang: Inspire. Diakses dari: <https://onesearch.id/Record/IOS3605.JATEN-01110000002376>
- Novelia, A. S., & Sardjito. (2015). Kriteria Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Preferensi Pedagangnya di Kawasan Perkotaan Sidoarjo. *Jurnal Teknik ITS*, 4(1), C-28-C–32. Diakses dari: <https://ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/article/download/8981/2116>
- Permadi, G. (2007). *Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!* Jakarta: Yudhistira. Diakses dari: <https://onesearch.id/Record/IOS2862.UNMAL000000000034101>
- Rahayu, M. J. (2020). *Stabilisasi Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Kota Surakarta: Strategi Informalitas Perkotaan yang Berkeadilan*. Medan: Yayasan Kita Menulis. Diakses dari: <https://kitamenulis.id/2020/09/16/stabilisasi-pedagang-kaki-lima-di-ruang-publik-kota-surakarta-strategi-informalitas-perkotaan-yang-berkeadilan/>
- Rahayu, M. J., Werdingtyas, R. R., & Musyawaroh. (2013). Stabilisasi Sebagai Bentuk Penataan PKL Makanan Siap Saji di Kota Surakarta. *Jurnal Tataloka*, 15(1), 39–52. <https://doi.org/10.14710/tataloka.15.1.39-52>
- Rahayu, M. J., & Widyastuti, S. (2021). Dampak Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan PKL di Kota Jakarta, Bandung dan Surabaya. *Jurnal Tataloka*, 23(2), 201–211. <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.2.201-211>
- Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., ... Stringer, L. C. (2009). Who's in and Why? a Typology of Stakeholder Analysis Methods for Natural Resource Management. *Journal of Environmental Management*, 90(5), 1933–1949. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2009.01.001>
- Saaty, T. L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. *International Journal Services Sciences*, 1(1), 83–98. Diakses dari: <https://www.rafikulislam.com/uploads/resources/197245512559a37aadea6d.pdf>
- Sari, A. P. (2003). *Studi Aspek yang Diprioritaskan pada Faktor Ekonomi, Sosial, dan Fisik dalam Penentuan Lokasi Pedagang Kaki Lima di Kota Mataram* (Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro. Diakses dari: <http://eprints.undip.ac.id/14859/1/2003MTPK2421.pdf>
- Sastrawan, I. W., Haris, I. A., & Suwena, K. R. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima di Pantai Penimbangan Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UNDIKSHA*, 5(1). <https://doi.org/10.23887/jjpe.v5i1.5084>
- Shirvani, H. (1985). *The Urban Design Process*. New York: Van Nostrand Reinhold Company. Diakses dari: https://books.google.com/books/about/The_Urban_Design_Process.html?hl=id&id=CEdPAAAAMAAJ
- Singer, H., & Ozsahin, S. (2018). Employing an Analytic Hierarchy Process to Prioritize Factors Influencing Surface Roughness of Wood and Wood-Based Materials in the Sawing Process. *Turkish Journal of Agriculture and Forestry Volume*, 42(5), 364–371. <https://doi.org/10.3906/tar-1801-138>
- Surya, O. L. (2006). *Kajian Karakteristik Berlokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Sekitar Fasilitas Kesehatan (Studi Kasus: Rumah Sakit dr. Kariadi Kota Semarang)* (Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro. Diakses dari:

<http://eprints.undip.ac.id/4177/>

- Suryani, Y. (2015). *Teori Lokasi dalam Penentuan Pembangunan Lokasi Pasar Tradisional (Telaah Studi Literatur)*. Padang. Diakses dari: [http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahahan/3_Yosi_Suryani_\(hal_152-163\)_0.pdf](http://fe.unp.ac.id/sites/default/files/unggahahan/3_Yosi_Suryani_(hal_152-163)_0.pdf)
- Susilo, A. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pedagang Kaki Lima Menempati Bahu Jalan di Kota Bogor (Studi Kasus Pedagang Sembako di Jalan Dewi Sartika Utara)* (Universitas Indonesia). Universitas Indonesia. Diakses dari: <https://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20295630-T29915-Faktor-faktor.pdf>
- Suyanto, B., & Karnaji. (2005). *Kemiskinan dan Kesenjangan Sosial: Ketika Pembangunan Tak Berpihak Kepada Rakyat Miskin*. Surabaya: Airlangga University Press. Diakses dari: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1573878>
- Tarigan, R. (2006). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Bumi Aksara. Diakses dari: <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=363525>
- Tjiptono, F. (2002). *Strategi Pemasaran*. Yogyakarta: Andi. Diakses dari: <https://onsearch.id/Record/IOS2862.UNMAL00000000016793/Preview>
- Widjajanti, R. (2012). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Ruang Kota (Studi Kasus : Kawasan Pendidikan Tembalang, Kota Semarang). *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(4), 412–424. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6498>
- Widjajanti, R. (2015a). Karakteristik Aktivitas Pedagang Kaki Lima di Jalan Kartini, Semarang. *Jurnal RUANG*, 1(3), 151–160. <https://doi.org/10.14710/RUANG.1.4.151-160>
- Widjajanti, R. (2015b). Pemanfaatan Ruang Publik Kota Sebagai Tempat Aktivitas Pedagang Kaki Lima Studi Kasus: di Kawasan Pecinan, Semarang. *Conference on URBAN STUDIES AND DEVELOPMENT*, 262–273. Semarang: Universitas Diponegoro. Diakses dari: http://eprints.undip.ac.id/82996/1/3._PEMANFAATAN_RUANG_PUBLIK_KOTA_SEBAGAI_TEMPAT_AKTIVITAS_PKL_DI_KAWASAN_PECINAN_SMG_-_Prosiding_CoUSD_2015-RW.pdf
- Widjajanti, R. (2016). The Space Utilization by Street Vendors Based on the Location Characteristics in the Education Area of Tembalang, Semarang. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 227 (November 2015), 186–193. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.06.061>
- Widodo, A. (2000). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Lokasi Usaha Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus: Kota Semarang)* (Universitas Diponegoro). Universitas Diponegoro. Diakses dari: <http://eprints.undip.ac.id/14439/>